

Analisis Peran Kas dan Rekening Giro pada Bank Indonesia dalam Stabilitas Sistem Perbankan

Cakra Famati Harefa¹, Resi Restu Hia^{2*}, Aldi Sitorus³, E. Hamonangan Siallagan⁴
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas HKBP Nommensen Medan, Indonesia

Corresponding Author: resirestu3@gmail.com

Published: Januari 2026

ABSTRACT

This study examines the role of cash and current accounts at Bank Indonesia (BI) in maintaining the stability of Indonesia's banking system by comparing practices in conventional and Islamic banks. Cash and BI current accounts are critical to liquidity management, compliance with the Statutory Reserve Requirement (GWM), and the transmission of monetary policy. The study employs a descriptive qualitative method with a case study approach focusing on Bank Mandiri (conventional) and Bank Syariah Indonesia (BSI) over the 2020–2024 period. Data were analyzed through a review of financial statements, Bank Indonesia regulations, and relevant accounting standards (PSAK for conventional banks and PSAK Syariah for Islamic banks). The findings indicate that while the core functions of cash and BI current accounts are broadly similar across both banking models, notable differences exist in accounting treatment, GWM management, and liquidity strategies. Conventional banks tend to optimize funds to enhance profitability through money market instruments, whereas Islamic banks place greater emphasis on prudence, sharia compliance, and systemic stability. These results highlight the importance of regulatory harmonization and the development of sharia-compliant liquid instruments to support a more inclusive national banking stability framework.

Keywords: cash; Bank Indonesia current account; statutory reserve requirement; liquidity; conventional bank; Islamic bank; monetary policy.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licence, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Sistem perbankan memegang peran sentral dalam perekonomian Indonesia karena berfungsi sebagai lembaga intermediasi, penyedia layanan sistem pembayaran, serta kanal transmisi kebijakan moneter. Oleh karena itu, likuiditas dan stabilitas perbankan menjadi prasyarat penting bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Puri, 2012). Dalam kerangka tersebut, pengelolaan kas dan rekening giro pada Bank Indonesia (BI) merupakan elemen fundamental yang tidak hanya mencerminkan kesehatan likuiditas masing-masing bank, tetapi juga berkaitan langsung dengan efektivitas kebijakan moneter dan penguatan pengawasan makroprudensial. Kas dan giro BI berperan sebagai buffer likuiditas primer, sarana penyelesaian transaksi antarbank, serta instrumen pemenuhan kewajiban Giro Wajib Minimum (GWM) yang ditetapkan otoritas moneter (Bank Indonesia, 2018).

Penerapan sistem perbankan ganda (dual banking system) di Indonesia—yang mencakup bank konvensional dan bank syariah—menambah kompleksitas dalam pengelolaan likuiditas. Bank syariah menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sehingga seluruh aktivitas, termasuk pengelolaan kas dan giro, harus terhindar dari unsur riba, gharar, dan maysir (Gunawan & Barlinti, 2022). Sebaliknya, bank konvensional umumnya mengoptimalkan likuiditas dengan orientasi efisiensi dan profitabilitas melalui instrumen berbasis bunga serta aktivitas pasar uang (Haryadi & Sidiq, 2013). Perbedaan karakteristik dan filosofi operasional ini berimplikasi pada strategi manajemen kas, struktur penempatan dana likuid, perlakuan akuntansi, serta respons bank terhadap ketentuan GWM dan dinamika kebijakan BI.

Kajian terdahulu menunjukkan bahwa perubahan kebijakan dan regulasi perbankan dapat memengaruhi perilaku permintaan uang dan strategi pengelolaan likuiditas. Nopirin (1998)

menegaskan bahwa deregulasi perbankan 1983 turut mengubah dinamika permintaan uang dan elastisitasnya terhadap suku bunga. Penelitian lainnya juga mengindikasikan adanya keterkaitan antara struktur pendanaan, penempatan likuiditas, dan kinerja bank. Elvira dkk. (2020) serta Musyafa (2024), misalnya, menyoroti bahwa komposisi Dana Pihak Ketiga (DPK) dan pengelolaan GWM berpengaruh terhadap profitabilitas dan stabilitas perbankan. Meski demikian, studi yang secara komprehensif membandingkan peran dan pengelolaan kas serta giro BI antara bank konvensional dan bank syariah—terutama dengan menautkannya pada aspek akuntansi, strategi likuiditas, serta implikasinya terhadap stabilitas sistem perbankan—masih relatif terbatas.

Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis peran kas dan rekening giro pada BI dalam menjaga stabilitas sistem perbankan Indonesia dengan membandingkan praktik pada bank konvensional dan bank syariah. Secara khusus, penelitian ini fokus pada: (1) posisi dan peran kas serta giro BI dalam struktur aset dan strategi likuiditas bank konvensional dan bank syariah; (2) perbedaan perlakuan akuntansi dan pengakuan pendapatan terkait pos kas dan giro BI berdasarkan standar yang berlaku (PSAK dan PSAK Syariah); serta (3) implikasi pengelolaan GWM terhadap stabilitas dan profitabilitas pada kedua jenis bank. Temuan penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya literatur mengenai manajemen likuiditas pada dual banking system, sekaligus menjadi masukan bagi otoritas dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif, termasuk pengembangan instrumen likuid syariah guna memperkuat stabilitas perbankan nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus komparatif untuk menganalisis peran kas dan rekening giro pada Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas sistem perbankan, serta membandingkan praktik pengelolaannya pada bank konvensional dan bank syariah. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian tidak berfokus pada pengujian hipotesis statistik, melainkan bertujuan memperoleh pemahaman mendalam mengenai proses, konteks, dan makna di balik perbedaan strategi likuiditas dan pemenuhan Giro Wajib Minimum, termasuk konsekuensi akuntansi serta implikasi kinerja yang melekat pada perbedaan karakteristik model bisnis bank (Moleong, 2017). Unit analisis penelitian adalah Bank Mandiri sebagai representasi bank konvensional dan Bank Syariah Indonesia sebagai representasi bank syariah, dengan cakupan periode pengamatan 2020 sampai 2024 untuk menangkap dinamika pascapandemi, perubahan kebijakan likuiditas, serta respons perbankan terhadap perkembangan makroekonomi dan industri, sejalan dengan fokus penelitian pada komparasi pengelolaan kas dan giro BI pada dua sistem perbankan (Musyafa, 2024).

Sumber data penelitian terdiri atas data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan, laporan keuangan auditan, laporan manajemen risiko, serta publikasi resmi kedua bank selama periode penelitian, disertai regulasi dan dokumen kebijakan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia serta otoritas terkait yang mengatur GWM, manajemen likuiditas, dan operasi moneter. Penggunaan data sekunder dipilih karena mampu memberikan jejak kebijakan dan keputusan manajerial yang dapat ditelusuri secara konsisten lintas periode melalui laporan formal, sekaligus memadai untuk membaca perbedaan strategi likuiditas dan perilaku bank dalam merespons ketentuan GWM pada dua model perbankan (Elvira et al., 2020; Gunawan & Barlinti, 2022). Untuk memperkuat ketepatan interpretasi, penelitian juga menggunakan standar akuntansi yang berlaku sebagai rujukan analitis, yakni PSAK berbasis IFRS untuk bank konvensional dan PSAK Syariah untuk bank syariah, khususnya terkait klasifikasi kas dan setara kas, pengakuan pendapatan, serta pengukuran aset keuangan. Penekanan pada aspek akuntansi syariah diperlukan karena perbedaan prinsip pengakuan pendapatan dan kehati-hatian pelaporan pada transaksi syariah dapat memengaruhi cara bank menampilkan kinerja dan menilai posisi likuiditasnya (Bara, 2018; Dwi Suryanto et al., 2024). Data kemudian dikompilasi dan disajikan dalam bentuk rangkaian tren dan rasio, terutama total kas dan giro BI, proporsinya terhadap total aset, serta keterkaitannya dengan indikator kinerja dan risiko seperti margin, profitabilitas, dan ketahanan likuiditas, agar perbandingan lintas bank dapat dilakukan secara konsisten dan relevan dengan temuan literatur mengenai hubungan struktur pendanaan, kebijakan likuiditas, dan kinerja bank (Elvira et al., 2020; Tirta et al., 2025).

Teknik analisis data dilakukan melalui analisis isi dokumen dan analisis komparatif antar kasus dengan tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi, informasi dipilah berdasarkan tema utama penelitian, yaitu posisi dan tren kas dan giro BI, perlakuan akuntansi dan pengakuan pendapatan, strategi pengelolaan GWM dan likuiditas berlebih, serta implikasinya terhadap profitabilitas dan stabilitas. Selanjutnya, data ditelaah secara lintas waktu untuk mengidentifikasi pola perubahan, kemudian dibandingkan antar bank untuk menilai perbedaan strategi serta faktor institusional yang melatarbelakanginya, termasuk karakteristik instrumen pasar uang yang memengaruhi opsi penempatan likuiditas pada sistem konvensional dan syariah (Haryadi & Sidiq, 2013; Gunawan & Barlinti, 2022). Untuk meningkatkan validitas, penelitian menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan temuan dari laporan keuangan dengan regulasi dan ketentuan terkait, serta menilai konsistensi narasi manajemen dalam laporan tahunan terhadap angka dan rasio yang disajikan, sesuai praktik penguatan kredibilitas pada penelitian kualitatif berbasis dokumen (Moleong, 2017). Hasil analisis kemudian diinterpretasikan menggunakan kerangka teori intermediasi keuangan, manajemen likuiditas perbankan, serta perspektif kebijakan moneter dan makroprudensial, sehingga temuan empiris dapat dijelaskan secara konseptual dan relevan bagi implikasi manajerial maupun rekomendasi kebijakan, termasuk pada konteks perbankan syariah dan instrumen kebijakan yang sejalan dengan prinsip maqashid syariah (Gunawan & Barlinti, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Perbandingan Posisi dan Tren Kas dan Giro BI 2020–2024

Analisis komparatif atas laporan keuangan Bank Mandiri dan Bank Syariah Indonesia selama periode 2020 sampai 2024 menunjukkan perbedaan pendekatan yang konsisten dalam menjaga likuiditas primer. Pada Bank Mandiri, total kas dan rekening giro pada Bank Indonesia mencerminkan pola pengelolaan yang dinamis dan responsif terhadap perubahan kondisi makroekonomi. Rata rata kas dan giro BI tercatat sebesar Rp121,17 triliun, namun proporsinya terhadap total aset menurun secara bertahap dari 7,13 persen pada 2021 menjadi 5,64 persen pada 2024. Penurunan rasio ini mengindikasikan kecenderungan bank untuk mengurangi dana menganggur dan mengalihkan kelebihan likuiditas ke aset produktif seiring pemulihan ekonomi pascapandemi serta meningkatnya peluang penempatan pada instrumen keuangan yang memberikan imbal hasil, sehingga efisiensi pengelolaan likuiditas dapat ditingkatkan tanpa mengorbankan kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek.

Berbeda dengan itu, Bank Syariah Indonesia menunjukkan kecenderungan yang lebih konservatif sekaligus ekspansif dari sisi nominal. Total kas dan giro BI meningkat dari Rp24,7 triliun pada 2020 menjadi Rp58,0 triliun pada 2024, dan pada saat yang sama rasio kas dan giro BI terhadap total aset turut meningkat dari 10,31 persen menjadi 14,20 persen. Pola ini memperlihatkan bahwa penguatan likuiditas primer tidak semata mengikuti pertumbuhan aset, melainkan merupakan pilihan strategis untuk mempertahankan buffer likuiditas yang lebih besar. Strategi tersebut selaras dengan karakteristik perbankan syariah yang menekankan prinsip kehati-hatian, struktur Dana Pihak Ketiga yang relatif lebih rentan terhadap volatilitas karena dominasi akad wadiah dan mudharabah, serta terbatasnya ketersediaan instrumen pasar uang syariah jangka pendek yang likuid sebagai alternatif penempatan dana, sehingga penahanan likuiditas primer menjadi salah satu langkah mitigasi risiko yang paling realistis.

Perlakuan Akuntansi dan Pengakuan Pendapatan atas Kas dan Giro BI

Perbedaan model bisnis bank konvensional dan bank syariah tercermin dalam perlakuan akuntansi dan pengakuan pendapatan terkait pos kas dan giro BI. Bank Mandiri menerapkan prinsip akrual sesuai PSAK yang berbasis IFRS, sehingga pendapatan yang berasal dari penempatan dana pada instrumen pasar uang atau aset keuangan lainnya diakui secara proporsional sepanjang periode berjalan. Dengan pendekatan tersebut, pendapatan dapat dicatat secara periodik meskipun penerimaan kas terjadi pada periode pembayaran tertentu, sehingga kinerja terlihat lebih stabil dan mencerminkan ekspektasi penghasilan. Selain itu, pada kondisi tertentu pengukuran aset keuangan

juga dapat menggunakan nilai wajar yang merefleksikan perubahan kondisi pasar, walaupun implikasinya dapat meningkatkan volatilitas kinerja akuntansi ketika terjadi fluktuasi harga pasar.

Sementara itu, Bank Syariah Indonesia cenderung lebih konservatif dalam pengakuan pendapatan sejalan dengan PSAK Syariah dan prinsip kehati-hatian dalam akad. Pada beberapa akad, khususnya yang terkait mekanisme bagi hasil, pendapatan pada dasarnya diakui ketika telah terealisasi dan tersedia untuk didistribusikan, sebagai upaya menghindari ketidakpastian dan menjaga keadilan pembagian hasil. Konsekuensinya, laba yang dilaporkan lebih merefleksikan pendapatan yang benar benar telah terjadi secara kas, sehingga tingkat konservatisme laporan keuangan relatif lebih tinggi. Dari sisi pengukuran, kecenderungan mempertahankan biaya perolehan pada sejumlah aset juga berfungsi menekan volatilitas yang bersumber dari fluktuasi harga pasar, sehingga stabilitas pelaporan lebih terjaga dalam konteks karakteristik risiko dan kepatuhan syariah.

Strategi Pengelolaan GWM dan Likuiditas Berlebih

Pemenuhan Giro Wajib Minimum merupakan kewajiban bagi kedua bank, namun perbedaan muncul pada strategi pengelolaan dana di atas ambang minimum. Bank Mandiri menampilkan strategi optimalisasi imbal hasil, yaitu likuiditas berlebih dialokasikan secara aktif ke berbagai instrumen pasar uang dan surat berharga yang likuid serta memberikan pendapatan, seperti surat berharga pemerintah, penempatan antarbank, dan transaksi repo. Orientasi ini diarahkan untuk meningkatkan Net Interest Margin melalui pengelolaan aset dan liabilitas yang proaktif, didukung kemampuan memprediksi kebutuhan likuiditas harian serta mengelola volatilitas pasar secara lebih fleksibel, sehingga dana likuid tidak terlalu lama mengendap dalam bentuk kas dan giro yang berimbal hasil rendah.

Sebaliknya, Bank Syariah Indonesia menghadapi kendala struktural karena terbatasnya kedalaman pasar instrumen likuid syariah jangka pendek serta ketidakmungkinan menggunakan instrumen berbasis bunga. Kondisi tersebut mempersempit alternatif penempatan likuiditas berlebih, sehingga sebagian dana cenderung bertahan pada giro BI sebagai cadangan yang paling aman dari sisi likuiditas dan kepatuhan syariah, meskipun tidak menghasilkan pendapatan yang signifikan. Opsi lain berupa penempatan pada instrumen syariah yang tersedia, penyaluran pembiayaan berjangka sangat pendek, atau aktivitas di pasar antarbank syariah tetap memiliki keterbatasan dari sisi proses, risiko, dan skala pasar. Konfigurasi ini menimbulkan trade off antara profitabilitas dan kepatuhan syariah, karena pilihan yang paling aman untuk menjaga integritas syariah dan kesiapan likuiditas berpotensi menekan tingkat pengembalian aset.

Dampak terhadap Kinerja Keuangan dan Stabilitas

Perbedaan strategi likuiditas tersebut berimplikasi pada kinerja keuangan dan profil risiko masing-masing bank. Dari sisi profitabilitas, bank konvensional seperti Bank Mandiri umumnya mempertahankan Net Interest Margin yang lebih tinggi karena kemampuan mengoptimalkan seluruh likuiditas, termasuk dana berlebih, ke instrumen berimbal hasil. Keunggulan ini diperkuat oleh struktur pendanaan yang lebih efisien melalui dana murah, sehingga biaya dana dapat ditekan dan margin tetap terjaga, sebagaimana ditunjukkan oleh temuan penelitian terdahulu yang menautkan komposisi pendanaan dengan kinerja profitabilitas. Sebaliknya, bank syariah cenderung menghadapi tekanan profitabilitas karena terbatasnya instrumen likuid berimbal hasil yang sesuai syariah serta kompleksitas operasional akad yang dapat meningkatkan biaya, sehingga ruang optimalisasi pendapatan dari manajemen likuiditas menjadi lebih sempit.

Namun, dari sisi stabilitas dan risiko likuiditas, Bank Syariah Indonesia memperlihatkan posisi likuiditas primer yang lebih kuat sebagaimana tercermin dari rasio kas dan giro BI terhadap aset yang lebih tinggi. Buffer likuiditas yang besar meningkatkan ketahanan bank terhadap guncangan penarikan dana mendadak dan tekanan pasar pada kondisi ketidakpastian. Sementara itu, strategi optimalisasi imbal hasil pada bank konvensional berpotensi meningkatkan risiko mismatch likuiditas apabila terjadi tekanan penarikan dana secara cepat, karena sebagian aset likuid tersimpan dalam instrumen yang membutuhkan waktu pencairan atau berisiko mengalami penurunan nilai ketika dijual cepat. Di luar dimensi keuangan, kepatuhan syariah juga memberikan keuntungan reputasional bagi bank syariah yang dapat memperkuat kepercayaan dan loyalitas nasabah dalam jangka panjang, meskipun terdapat konsekuensi terhadap profitabilitas jangka pendek.

Pembahasan

Interpretasi Temuan dalam Kerangka Teori dan Regulasi

Temuan penelitian ini dapat dijelaskan melalui perspektif teori intermediasi keuangan dan kerangka kebijakan moneter. Dalam kerangka intermediasi, perilaku Bank Mandiri yang menekan porsi kas dan giro BI selaras dengan logika efisiensi pengelolaan saldo kas, di mana dana likuid berlebih dialihkan ke aset produktif agar menghasilkan imbal hasil dan mendukung fungsi intermediasi secara lebih optimal. Sebaliknya, perilaku Bank Syariah Indonesia menonjolkan dimensi biaya kepatuhan prinsip, yakni konsekuensi dari kehati-hatian dan kepatuhan syariah yang mendorong pemeliharaan likuiditas primer lebih besar, terutama ketika pilihan instrumen likuid syariah masih terbatas. Dari sisi regulasi, meskipun GWM dirancang sebagai instrumen pengendalian moneter yang bersifat umum, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa transmisi kebijakan melalui GWM berpotensi tidak simetris pada sistem perbankan ganda. Pelonggaran atau pengetatan likuiditas cenderung lebih cepat direspons bank konvensional melalui ekspansi kredit atau penempatan pada pasar uang, sedangkan pada bank syariah respons dapat tertahan oleh keterbatasan saluran penempatan yang sesuai syariah, sehingga penguatan instrumen moneter syariah menjadi penting agar transmisi kebijakan lebih merata.

Implikasi Manajerial dan Strategis

Bagi manajemen bank konvensional, strategi optimalisasi likuiditas perlu disertai kerangka manajemen risiko likuiditas yang disiplin agar upaya peningkatan imbal hasil tidak meningkatkan kerentanan ketika terjadi tekanan likuiditas. Penguatan pengelolaan aset dan liabilitas, termasuk pelaksanaan stres uji secara berkala untuk skenario penarikan dana besar dan volatilitas pasar, menjadi prasyarat untuk menjaga stabilitas operasional. Pada saat yang sama, penguatan sumber dana murah melalui inovasi produk giro dan tabungan perlu terus ditingkatkan agar biaya dana tetap efisien dan ruang profitabilitas terjaga. Bagi bank syariah, tantangan utama adalah meningkatkan produktivitas likuiditas tanpa melanggar prinsip syariah, sehingga strategi yang relevan mencakup penguatan kerja sama dengan otoritas dan pelaku pasar untuk memperluas instrumen likuid syariah jangka pendek, memperdalam pasar antarbank syariah, serta memperbesar porsi pendapatan berbasis fee guna mengurangi ketergantungan pada margin pembiayaan. Edukasi nasabah mengenai karakteristik produk syariah juga penting untuk membangun ekspektasi yang realistis, sehingga tekanan kompetisi imbal hasil dapat dikelola secara lebih sehat.

Rekomendasi Kebijakan bagi BI dan OJK

Dari sisi kebijakan, penguatan ekosistem instrumen likuid syariah merupakan prasyarat agar sistem perbankan ganda bergerak secara seimbang dan stabil. Bank Indonesia dapat memperluas peran dalam pengembangan pasar uang syariah melalui ketersediaan instrumen jangka pendek yang lebih reguler dan likuid, serta dukungan mekanisme transaksi yang meningkatkan kemampuan bank syariah mengelola likuiditas secara produktif tanpa melanggar prinsip. Di sisi lain, OJK dapat mempertimbangkan karakteristik risiko dan kepatuhan syariah dalam penerapan rasio likuiditas seperti Liquidity Coverage Ratio dan Net Stable Funding Ratio agar tidak menimbulkan beban yang tidak proporsional bagi bank syariah. Harmonisasi dan transparansi pelaporan posisi likuiditas, termasuk kas dan giro BI, juga penting untuk meningkatkan keterbandingan data, memperkuat kualitas pengawasan sistemik, serta memudahkan evaluasi efektivitas kebijakan pada kedua sistem perbankan. Dalam konteks yang lebih luas, kebijakan moneter yang inklusif memerlukan instrumen yang efektif bagi perbankan syariah agar sinyal kebijakan dapat ditransmisikan secara merata ke seluruh industri.

Keterbatasan Penelitian dan Arah Penelitian Mendatang

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan studi kasus pada dua bank, sehingga generalisasi temuan perlu dilakukan secara hati-hati dan mempertimbangkan heterogenitas industri perbankan. Selain itu, dominasi pendekatan kualitatif menyebabkan hubungan kausal antara strategi pengelolaan kas dan giro BI terhadap indikator stabilitas dan profitabilitas belum dapat diukur secara kuat. Penelitian lanjutan dapat mengembangkan analisis panel data pada cakupan bank yang lebih luas untuk menguji hubungan rasio kas dan giro BI dengan indikator stabilitas seperti

Z score, risiko gagal bayar, serta indikator profitabilitas seperti ROA dan ROE. Kajian kebijakan berbasis simulasi makroekonomi juga relevan untuk menguji efektivitas desain GWM dan instrumen operasi moneter syariah, sementara penelitian perilaku nasabah dapat memperkaya pemahaman sisi permintaan terkait preferensi keamanan, likuiditas, dan persepsi imbal hasil pada bank konvensional dan bank syariah.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kas dan rekening giro pada Bank Indonesia memiliki peran yang bersifat ganda, yakni sebagai instrumen manajemen likuiditas pada tingkat mikro bagi masing-masing bank sekaligus sebagai bagian dari mekanisme kebijakan moneter dan pengendalian likuiditas pada tingkat makro. Hasil analisis menunjukkan adanya perbedaan pengelolaan yang cukup mendasar antara bank konvensional dan bank syariah, yang terutama dipengaruhi oleh perbedaan paradigma operasional, perlakuan akuntansi, serta ketersediaan instrumen likuid di pasar keuangan. Bank konvensional cenderung mengelola kas dan giro BI dengan orientasi efisiensi dan optimalisasi profitabilitas melalui penempatan pada aset produktif yang memberikan imbal hasil, sedangkan bank syariah lebih menekankan kehati-hatian, kepatuhan terhadap prinsip syariah, dan penguatan buffer likuiditas untuk menjaga stabilitas jangka panjang. Perbedaan ini tidak serta merta menunjukkan bahwa salah satu sistem lebih unggul dibanding yang lain, melainkan menggambarkan karakter dual banking system di Indonesia yang dapat saling melengkapi, di mana pendekatan optimalisasi pada bank konvensional mendukung efisiensi intermediasi, sementara pendekatan konservatif pada bank syariah berpotensi memperkuat ketahanan sistemik ketika terjadi tekanan likuiditas.

Berdasarkan temuan tersebut, otoritas pengawas dan pembuat kebijakan, khususnya Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, perlu memperkuat kerangka kebijakan likuiditas dan pengaturan Giro Wajib Minimum yang lebih adaptif terhadap karakteristik masing-masing model perbankan, tanpa mengurangi prinsip keadilan dan kehati-hatian. Upaya diferensiasi kebijakan dapat dipertimbangkan sepanjang tetap menjaga integritas pengawasan dan efektivitas transmisi kebijakan moneter pada keseluruhan sistem perbankan. Selain itu, percepatan inovasi dan pendalaman instrumen pasar uang syariah menjadi agenda strategis agar bank syariah memiliki alternatif pengelolaan likuiditas yang lebih produktif sekaligus tetap memenuhi prinsip kepatuhan syariah, sehingga trade off antara stabilitas dan profitabilitas dapat dikelola secara lebih seimbang.

Pada tingkat manajerial, bank konvensional disarankan untuk mempertahankan strategi optimalisasi likuiditas dengan tetap menempatkan manajemen risiko likuiditas sebagai prioritas, khususnya melalui penguatan tata kelola aset dan liabilitas, pemantauan mismatch likuiditas, serta pelaksanaan stres uji secara berkala untuk mengantisipasi skenario krisis. Sementara itu, bank syariah perlu memperkuat strategi pengelolaan likuiditas melalui peningkatan literasi keuangan nasabah, terutama terkait karakteristik produk giro syariah dan konsekuensi pilihan akad terhadap imbal hasil, sehingga ekspektasi nasabah dapat dikelola lebih realistis dan stabilitas dana dapat ditingkatkan. Pada saat yang sama, diversifikasi sumber pendapatan dan optimalisasi fee based income juga relevan untuk memperkuat kinerja tanpa meningkatkan eksposur pada risiko yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Untuk penelitian selanjutnya, diperlukan pengembangan kajian kuantitatif yang menguji secara empiris pengaruh strategi pengelolaan kas dan giro BI terhadap indikator stabilitas perbankan, misalnya menggunakan Z score, serta dampaknya terhadap profitabilitas dalam jangka panjang. Selain itu, penelitian yang lebih mendalam mengenai desain instrumen GWM syariah yang ideal juga penting dilakukan, baik dari sisi kesesuaian dengan maqashid syariah maupun dari sisi efektivitas transmisi kebijakan moneter, sehingga rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dapat lebih operasional, terukur, dan relevan bagi penguatan stabilitas sistem perbankan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Bara, Z. B. (2018). Implementasi akuntansi perbankan syariah di Indonesia berbasis accrual. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 53–60.
- Dwi Suryanto, P., Asyik, N. F., & Wahidahwati. (2024). Penerapan akuntansi syariah pada perbankan di Indonesia dan Malaysia atas transaksi mudharabah. *Jurnal Ilmiah*, 10(03), 2756–2765.

- Elvira, H., Hermawan, D., & Mauluddi, H. A. (2020). Pengaruh dana pihak ketiga dan giro wajib minimum terhadap return on assets pada bank umum konvensional. *Indonesian Journal of Economics and Management*, 1(1), 195–204.
- Gunawan, A., & Barlinti, Y. S. (2022). Pengaturan giro wajib minimum bank syariah sebagai sebuah instrumen kebijakan moneter dalam pandangan maqashid syariah. *Palar | Pakuan Law Review*, 8(1), 473–485.
- Haryadi, A., & Sidiq, S. (2013). Inter-bank call money market transaction in Indonesia. *Economic Journal of Emerging Markets*, 5(2), 92–98.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Musyafa, M. I. A. (2024). *Analisis pengelolaan kas dan rekening giro pada Bank Indonesia dalam perspektif akuntansi perbankan umum dan syariah: Studi kasus pada Bank Syariah Indonesia dan Bank Mandiri* (Skripsi, Universitas Tidar).
- Nopirin. (1998). Analisis permintaan akan uang kas di Indonesia 1975–1996. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 13(2), 92–118.
- Puri, N. (2012). Role of money market in context to growth of Indian economy. *International Journal of Marketing, Financial Services & Management Research*, 1(9), 142–154.
- Tirta, C. O., Zanaria, Y., & Sari, G. P. (2025). Analisis komposisi giro, tabungan, dan deposito terhadap profitabilitas perusahaan. *Expensive | Jurnal Akuntansi*, 4(1), 107–118.